

BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya terkait dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Pemerintahan Nagari Bahagia Padang Gelugur dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Pemerintahan Nagari Bahagia Padang Gelugur mencakup lima aspek yaitu perencanaan melalui Musrenbang yang menghasilkan APB Nagari, sumber pendapatan yang sepenuhnya bergantung pada transfer pemerintah pusat, pengelolaan dana pada empat bidang pembangunan, pencatatan menggunakan aplikasi Siskeudes, serta pengawasan berlapis oleh Bamus dan Inspektorat.
2. Pelaksanaan desentralisasi fiskal menghadapi empat kendala yaitu keterlambatan pencairan dana, keterbatasan kapasitas SDM aparatur, gangguan jaringan internet, dan keterlambatan dokumen pihak ketiga. Selain itu terdapat empat tantangan struktural berupa penyesuaian sistem digital, kesenjangan transparansi teknis, ketidaktuntasan sejumlah program pembangunan, serta ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat.
3. Ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*, pelaksanaan desentralisasi fiskal di nagari ini menunjukkan gambaran yang belum sepenuhnya optimal. Prinsip keadilan sudah tercermin dari keberpihakan program pada kebutuhan petani, prinsip musyawarah sudah berjalan melalui musrenbang yang konsisten, prinsip amanah sudah diupayakan melalui sistem non-tunai dan siskeudes, dan prinsip kemaslahatan sudah terwujud sebagian melalui pembangunan infrastruktur pertanian. Keempat prinsip tersebut belum terpenuhi secara utuh

karena keterbatasan anggaran, kapasitas sdm, dan transparansi teknis masih menjadi faktor pembatas utama.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan desentralisasi fiskal di Pemerintahan Nagari Bahagia Padang Gelugur:

1. Kepada lembaga Pemerintahan Nagari Bahagia Padang Gelugur, penulis menyarankan agar mengambil langkah nyata dalam meningkatkan transparansi teknis pelaksanaan program pembangunan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui publikasi rincian harga satuan material, biaya tenaga kerja, dan volume pekerjaan secara terbuka, tidak hanya melalui papan pengumuman tetapi juga melalui forum musyawarah secara berkala. Selain itu, pemerintah nagari perlu mulai merintis tentang pengembangan potensi ekonomi lokal melalui pembentukan dan penguatan Badan Usaha Milik Nagari (bumnag) sebagai langkah strategis jangka panjang untuk mewujudkan kemandirian fiskal nagari sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat secara bertahap dikurangi. Pemerintah nagari juga perlu memprioritaskan penyelesaian program-program pembangunan yang belum tuntas, terutama kantor balai pertemuan nagari dan perbaikan jaringan irigasi, sebagai wujud tanggung jawab terhadap aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui forum musyawarah.
2. Kepada aparatur Pemerintah Nagari Bahagia Padang Gelugur, penulis menyarankan agar senantiasa meningkatkan kapasitas diri dalam penguasaan teknologi administrasi keuangan, khususnya aplikasi Siskeudes yang kini telah beroperasi secara online penuh. Peningkatan kapasitas ini tidak hanya menyangkut tentang kemampuan teknis pengoperasian sistem, tetapi juga pemahaman

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola keuangan nagari sehingga setiap proses administrasi dapat dilaksanakan secara tepat, akurat, dan tepat waktu. Semangat amanah dalam Islam yang mengharuskan setiap pemegang amanah untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme hendaknya menjadi landasan moral yang selalu dipegang oleh seluruh aparatur nagari dalam mengemban tugas pengelolaan keuangan publik.

3. Kepada peneliti selanjutnya, penulis menyarankan agar kajian terkait dengan desentralisasi fiskal nagari dari perspektif *Siyasah Dusturiyah* dapat dikembangkan dengan cakupan yang lebih luas, baik dari sisi jumlah objek penelitian maupun dari sisi kedalaman analisis. Penelitian komparatif antara beberapa nagari dengan karakteristik fiskal yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi desentralisasi fiskal di tingkat pemerintahan nagari. Selain itu, kajian yang lebih mendalam mengenai upaya penguatan kemandirian fiskal nagari melalui optimalisasi BUMNag dari sudut pandang hukum ekonomi Islam juga sangat relevan untuk diteliti sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL

- Christia, dan Ispriyarso. 2019. "Efektivitas Desentralisasi Fiskal Dan Pengelolaan Keuangan Daerah." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Fikri, Al. 2025. "Prinsip Kemaslahatan Dalam Otonomi Daerah Dan Kebijakan Pemerintahan." *Jurnal Hukum Islam*.
- Gedeona, Nila. 2018. "Desentralisasi Fiskal Dan Ketimpangan Pembangunan Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 19 (1): 57–69.
- Hariadi, Dwi. 2023. "Dinamika Pemerintahan Nagari Dan Tantangan Tata Kelola Di Sumatera Barat." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 10 (1): 28–40.
- Hermawan, Dudi. 2007. "Desentralisasi Dan Kinerja Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmu Administrasi* 4 (1): 23–35.
- Hutasuhut. 2022. "Konsep Siyasah Dusturiyah Dalam Perspektif Abdul Wahhab Khallaf Dan Hasbi Ash-Shiddieqy." *Jurnal Hukum Islam*.
- Junaedi, Dedi, dan Ratri Istania. 2012. "Desentralisasi Fiskal Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Daerah." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 13 (2): 45–60.
- Musgrave, Richard A. 1983. "Public Finance, Now and Then." *FinanzArchiv/Public Finance Analysis*, no. H. 1: 1–13.
- Putra, Yandri. 2021. "Pemerintahan Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Sumatera Barat." *Jurnal Ius Civile* 5 (2): 144–56.
- Ridwan, Ahmad. 2020. "Siyasah Dusturiyah Dan Tata Kelola Pemerintahan Islam." *Jurnal Hukum Islam*.
- Santoso, Lukman. 2013. "Eksistensi Prinsip Syura Dalam Sistem Pemerintahan." *Jurnal Hukum* 3 (1).
- Sentari, Adinda Nurayu, et al. 2020. "Desentralisasi Dan Ketimpangan Antar Wilayah." *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Pembangunan* 3 (1).
- Setiawan, Zenal. 2023. "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." *Jurnal Cerdas Hukum* 2.
- Surya. 2013. "Kewenangan Pemerintahan Nagari Dalam Perspektif Otonomi Daerah." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Susana, Lina Marlina. 2026. "Rekonstruksi Konsep Amanah Al-Mawardi

Sebagai Dasar Reformasi Tata Kelola Ekonomi Publik Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 3 (1): 12–26.

Sutjipto, Hady. 2022. "Desentralisasi Fiskal Di Indonesia." *SUBS: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi* 3 (2).

Umar, Kusnadi. 2011. "Nilai-Nilai Keadilan Dalam Ketetapan MPR-RI Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Jurnal Hukum Islam* 2: 454–71.

Zakir, Fauzan. 2021. "Mengenal Sistem Pemerintahan Nagari Di Propinsi Sumatera Barat." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3 (5): 55.

Zulyanto. 2017. "Otonomi Daerah Dan Kemandirian Fiskal Dalam Perspektif Desentralisasi." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.

BUKU

Al-Mawardi, Imam. 2016. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press.

Al-Mawardi, Imam. 2020. *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah.

Djazuli, A. A. 2007. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Elmi. 2002. *Keuangan Negara Dan Desentralisasi Fiskal*. Jakarta: PT Grapindo Press.

Hirawan. 2007. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. Jakarta: t.p.

Iqbal, Muhammad. 2001. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Iqbal, Muhammad. 2007. *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cetakan 2. Jakarta: Yofa Mulia Offset.

Kaho, Josef Riwu. 1998. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kementerian Agama Republik Indonesia. t.t. *Al-Qur'an. Surat An-Nisa (4): 58*. Jakarta:

Miles, Matthew B, dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Baru*. Jakarta: UI Press.

Moleong, Lexy J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Navis, A. A. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Nurjaman, Asep. 2026. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Malang: UMMPress.
- Oentarto. 2004. *Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan*. Jakarta: Samitra Media Utama.
- Said, Mas'ud. 2005. *Arah Baru Otonomi Daerah Di Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Setiawan, Irfan. 2018. *Handbook Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Wahana Resolusi.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutan, M. Amir. 1985. *Adat Minangkabau: Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Sutrisno, Edy. 2022. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Mendagri RI. 2015. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Pasaman. 2017. *Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari*. Lubuk Sikaping: Pemerintah Kabupaten Pasaman. <https://jdih.pasaman.go.id>.
- Pemerintah Kabupaten Pasaman. 2021. *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat*. Lubuk Sikaping: Pemerintah Kabupaten Pasaman.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 2018. *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari*. Padang: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. 1999. Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2014. Jakarta: Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582>.

WEBSITE

Aziza, Rahmi. 2021. "Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Nagari Cubadak Tengah Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." Skripsi. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. <https://repository.uinib.ac.id/id/eprint/>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman. 2016. *Kecamatan Padang Gelugur Dalam Angka 2016*. Lubuk Sikaping: BPS Kabupaten Pasaman. <https://pasamankab.bps.go.id>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman. 2023. *Kabupaten Pasaman Dalam Angka 2023*. Lubuk Sikaping: BPS Kabupaten Pasaman. <https://pasamankab.bps.go.id>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman. 2023. *Kecamatan Padang Gelugur dalam Angka 2023* (No. 13090.2311). Lubuk Sikaping: BPS Kabupaten Pasaman. <https://pasamankab.bps.go.id/en/publication/2023/09/26/2d5bce3795a75b60cc8b1f39/kecamatan-padang-gelugur-dalam-angka-2023.html>.

Bappeda Kabupaten Pasaman. 2022. *Laporan Akhir Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2021–2026*. Lubuk Sikaping: Bappeda Kabupaten Pasaman. <https://bappeda.pasaman.go.id>.

BKKBN. 2022. *Profil Dan Pembentukan Nagari Bahagia Padang Gelugur*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/38252/bahagia-padang-galugua>.

Fadli, Muhammad. 2022. "Implementasi Dana Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Cugung, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan)." Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/>.

Kemendesa RI. 2022. *Evaluasi Tata Kelola Desa Dan Pelaksanaan Otonomi Fiskal Nagari*. Jakarta: Kemendesa RI.

Kementerian Agama Republik Indonesia.
<https://quran.kemenag.go.id/sura/4>.

Nagari Bahagia Padang Gelugur. 2026. *Profil Nagari Bahagia Padang Gelugur Tahun 2026*. Padang Gelugur: Pemerintah Nagari Bahagia Padang Gelugur.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 2025. *Data Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025*. Padang: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Diakses 4 April 2026.
<https://dashboardbencana.sumbarprov.go.id/statistics>.

WAWANCARA

Abdullah (Sekretaris Nagari Bahagia Padang Gelugur). 2026a. Wawancara Tentang Kapasitas Aparatur Nagari Dalam Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dan Administrasi Keuangan Digital. Nagari Bahagia Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman.

Abdullah (Sekretaris Nagari Bahagia Padang Gelugur). 2026b. Wawancara Tentang Kendala Infrastruktur Teknologi Dan Penggunaan Sistem Administrasi Keuangan Berbasis Online. Nagari Bahagia Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman.

Abdullah (Sekretaris Nagari Bahagia Padang Gelugur). 2026c. Wawancara Tentang Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari (APB Nagari) Di Nagari Bahagia Padang Gelugur. Nagari Bahagia Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman.

Abdullah (Sekretaris Nagari Bahagia Padang Gelugur). 2026d. Wawancara Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP). Nagari Bahagia Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman.

Abdullah (Sekretaris Nagari Bahagia Padang Gelugur). 2026e. Wawancara Tentang Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Nagari Melalui Aplikasi Siskeudes. Nagari Bahagia Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman.

Algani, M. Ikhwan. 2026. Wawancara dan Dokumentasi Penelitian Profil Nagari Bahagia Padang Gelugur. Pasaman.

Ali Yusuf Harahap (Masyarakat Nagari Bahagia Padang Gelugur). 2026a. Wawancara Tentang Efektivitas Musyawarah Nagari Dan Realisasi Aspirasi Masyarakat. Nagari Bahagia Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman.

- Ali Yusuf Harahap (Masyarakat Nagari Bahagia Padang Gelugur). 2026b. Wawancara Tentang Pelaksanaan Program Infrastruktur Dan Jalan Usaha Tani Di Nagari Bahagia Padang Gelugur. Nagari Bahagia Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman.
- Azwar Habibi Pasaribu (Masyarakat Nagari Bahagia Padang Gelugur). 2026. Wawancara Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Dan Penyampaian Aspirasi Di Nagari Bahagia Padang Gelugur. Nagari Bahagia Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman.
- Dongker (Tokoh Masyarakat Nagari Bahagia Padang Gelugur). 2026. Wawancara Tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Infrastruktur Nagari Bahagia Padang Gelugur. Nagari Bahagia Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman.
- Fitra, Ali (Wali Nagari Bahagia Padang Gelugur). 2025a. Wawancara Dengan Wali Nagari Tentang Kendala Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal. Nagari Bahagia Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman.
- Fitra, Ali (Wali Nagari Bahagia Padang Gelugur). 2025b. Wawancara Pra-Penelitian Tentang Pelaksanaan Kewenangan Fiskal Di Nagari Bahagia Padang Gelugur. Diwawancarai oleh M. Ikhwan Algani. Nagari Bahagia Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman.
- Fitra, Ali (Wali Nagari Bahagia Padang Gelugur). 2026a. Wawancara Tentang Kondisi Sosial Nagari Bahagia Padang Gelugur. Nagari Bahagia Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman.
- Fitra, Ali (Wali Nagari Bahagia Padang Gelugur). 2026b. Wawancara Tentang Kendala Pengelolaan Keuangan Dan Keterlambatan Pencairan Dana Nagari. Nagari Bahagia Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman.
- Fitra, Ali (Wali Nagari Bahagia Padang Gelugur). 2026c. Wawancara Tentang Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Dan Pemerintahan Nagari Bahagia Padang Gelugur. Nagari Bahagia Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman.
- Fitra, Ali (Wali Nagari Bahagia Padang Gelugur). 2026d. Wawancara Tentang Sumber Pendapatan Nagari Bahagia Padang Gelugur. Nagari Bahagia Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman.
- Fitra, Ali (Wali Nagari Bahagia Padang Gelugur). 2026e. Wawancara Tentang Sumber Pendapatan Nagari Dan Ketergantungan Terhadap Dana Transfer Pemerintah. Nagari Bahagia Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman.
- Jamaludin (Ketua Bamus Nagari Bahagia Padang Gelugur). 2026a. Wawancara Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Dan

Perencanaan Pembangunan Nagari. Nagari Bahagia Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman.

Jamaludin (Ketua Bamus Nagari Bahagia Padang Gelugur). 2026b. Wawancara Tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Dan Pelaksanaan Program Pembangunan Nagari. Nagari Bahagia Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman.

Yamin, Abu (Sekretaris Nagari Bahagia Padang Gelugur). 2026. Wawancara Tentang Kelancaran Pencairan Dana Nagari Di Nagari Bahagia Padang Gelugur. Nagari Bahagia Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman.



UIN IMAM BONJOL
PADANG